

SINTESA

Media Kajian Keagamaan dan Ilmu Sosial

**KETERKAITAN ANTARA ILMU PENGETAHUAN DAN
FILSAFAT**

(Studi Analisis atas QS. Al-An'am Ayat 125)

TABRANI. ZA

METODOLOGI STUDI HADITS IMAM BUKHARI

M. CHALIS

**KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN
ISLAM**

MURNI

**ANALISIS FAKTOR FUNDAMENTAL, ECONOMIC
VALUE ADDED (EVA), DAN VOLUME
PERDAGANGAN TERHADAP HARGA SAHAM DI
JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2008-2012**

JULIANA PUTRI

**PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ANAK USIA
PENDIDIKAN DASAR; EMOSIONAL, KOGNITIF, DAN
PSIKOMOTOR**

IRHAMNI

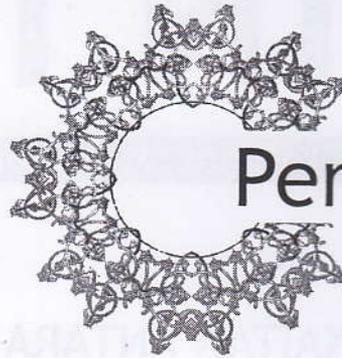


Jurnal Ilmiah Diterbitkan Oleh :

Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

(KOPERTAIS WILAYAH V ACEH)

Darussalam - Banda Aceh



Personalia

Penanggung Jawab

Farid Wajdi Ibrahim

Redaktur

M. Yacoeb

Editor

M. Pagar (UIN Sumatera Utara)

Muntasir (IAI Al-Azizyah Samalanga)

Bahriaty RS (UIN Ar-Raniry).

M. Chalis (UIN Ar-Raniry)

Muammar Yulian (UIN Ar-Raniry)

Fadhli (UIN Ar-Raniry)

Sekretariat

Taufiq S

Firda Elvisa

Bakri

Web Admin

Nazaruddin

Aridhatullah

Grafis/Setting

Fakhrul Azmi

Alamat Redaksi

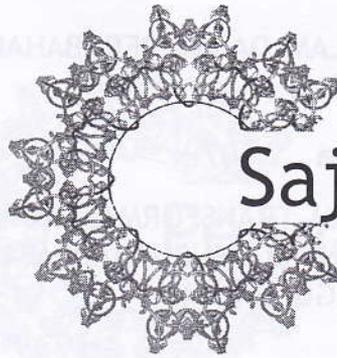
KOPERTAIS WILAYAH V ACEH

Gedung Biro Rektor Lantai III

Komplek Kampus UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh





Sajian Edisi Ini

Pengantar Editor

Tabrani ZA... 1

KETERKAITAN ANTARA ILMU PENGETAHUAN DAN FILSAFAT (Studi Analisis atas QS. Al-An'am Ayat 125)

Abdul Hadi ... 15

KETOKOHAN TGK MUHAMMAD DAUD BEUREUEH (Menelusuri Dinamika Perjuangan Rakyat Aceh)

Hendra Surya ... 29

PERAN PETUA SENEUBOK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BATAS TANAH (Kajian Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Masyarakat Adat di Aceh)

Husni ... 39

KEDUDUKAN AL-ISTISHAB, AL-MAZHAB SAHABI, DAN AHLUL MADINAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Murni... 51

KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Irhamni... 63

PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR; EMOSIONAL, KOGNITIF, DAN PSIKOMOTOR

Sulaiman ... 77

الإنسان

SUATU KAJIAN TEMATIK TENTANG POTENSI MANUSIA

Bahriaty RS ... 93

PERANAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERUBAHAN SOSIAL (Analisis Implementatif Menuju Masyarakat Religius)

Muhammad Arifin Ritonga ... 107

PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN TEKNIK SUPERVISI KEPALA MADRASAH TERHADAP KINERJA GURU MADRASAH ALIYAH SWASTA DI PESANTREN SE-KABUPATEN ACEH TENGGARA

M. CHALIS ... 133

METODOLOGI STUDI HADITS IMAM BUKHARI

Wati Oviana ... 141

PENERAPAN PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) PADA MATA KULIAH IPA MI TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PGMI

Megasari Gusandra Saragih... 151

ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN KINERJA PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS DENGAN KEPUASAN NASABAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PT. BNI (PERSERO), TBK KANTOR CABANG BIREUEN

Juliana Putri... 175

ANALISIS FAKTOR FUNDAMENTAL, ECONOMIC VALUE ADDED (EVA), DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP HARGA SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2008-2012

Biodata Penulis ... 191

KETOKOHAN TGK MUHAMMAD DAUD BEUREUEH (Menelusuri Dinamika Perjuangan Rakyat Aceh)

Oleh : Abdul Hadi

ABSTRAK

Tgk. Daud Beureeh adalah salah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, ketokohnya tidak dapat diragukan lagi, beliau dikenal sebagai pahlawan dan pemberontak. Dikenal pahlawan karena kegigihannya dalam melawan belanda dan jepang, adapun dianggap sebagai pemberontak, karena beliau pernah melawan pemerintah RI dengan memimpin Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), beliau mengangkat senjata melawan pemerintah karena pemerintah dianggap mengkhianati kesetiaan rakyat Aceh, Namun terlepas dari pro dan kontra tentang beliau, harus diakui bahwa dengan perjuangan beliau dinamika politik di Aceh berubah. Dan pengaruhnya sampai hari ini. Daud Beureueh tidak hanya sebagai politikus tapi juga sebagai pembaharu baik dalam bidang keagamaan maupun pendidikan di Aceh, wujud dari ide pembaharuannya dalam bidang pendidikan yaitu dengan pendirian madrasah Al Muslimun di kabupaten Jeumpa Bireun.

Kata Kunci: Tgk. Daud Beureueh, PUSA, DI/TII, Syariat Islam, dll.

I. PENDAHULUAN

Rakyat Aceh sejak berabad-abad dimasa kerajaan Aceh telah menganut agama Islam, agama ini telah menjadi darah dagingnya. tidak saja berlaku dalam kehidupan perorangan, akan tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara, agama telah bersemi secara mendalam sehingga adat, resam dan qanun pun bersandar kepada

agama. Tidak heran kalau timbul kata bersayap *hukom ngon adat lagei zat ngon sifeut* (Hukum dengan adat seperti zat dengan sifat). Oleh karena itu pula Aceh terkenal sebagai *Seuramoe Makah* (Serambi Mekkah)

Nanggroe Aceh Darussalam disebut Serambi Mekkah, karena rakyatnya hampir semuanya muslim dan taat beragama Islam. Aceh saat ini merupakan sebagai salah satu daerah di Republik Indonesia, kalau dilihat dari sistem pemerintahan, daerah Aceh telah mengalami sejarah yang panjang dan berliku-liku dengan berbagai gerakan dalam usaha membangun daerah sendiri dan usaha pemberlakuan Syari'at Islam. Selama masa revolusi, Aceh menjadi salah satu propinsi yang sangat mengagumkan, Aceh menjadi Daerah Modal bagi perjuangan pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana julukan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno.¹ Namun Presiden Soekarno tidak berkenan untuk memberikan keistimewaan Aceh dengan diberlakukannya Syari'at Islam di Aceh. Sehingga Rakyat Aceh saat itu kecewa dan melakukan pemberontakan kepada Soekarno yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh yang lebih dikenal dengan pemberontakan DI/TII yang telah banyak jatuh korban serta membuat Aceh menderita dalam waktu mencapai satu dasawarsa.

Perasaan tidak puas dan kekecewaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah pusat adalah kenyataan yang tidak dapat di bantah oleh siapapun, baik dari kalangan ulama, maupun dari golongan yang pada masa itu disebut "sisi-sisi feodal". Perasaan tidak puas itulah yang membuat para pemuka Aceh seperti Teungku Muhammad Daud Beureueh merasa tidak percaya kepada Pemerintah pusat. Maka menjadi suatu keniscayaan rakyat Aceh selalu menuntut hak istimewanya dengan pemberlakuan syari'at Islam.

Alhamdulillah saat ini di Aceh telah mendapatkan hak otonomnya dari Pemerintah Pusat dan sedang giatnya usaha pemberlakuan syari'at Islam. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi landasan yang kuat untuk menyelenggarakan syari'at Islam dalam satu propinsi dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.²

Peroleh hak dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh saat ini, tidak terlepas dari asal mula pemikiran usaha perjuangan para pejuang dahulu seperti Teungku Muhammad Daud Beureueh yang telah mengorbankan segalanya demi tegaknya syari'at Islam di bumi Aceh ini khususnya dan Indonesia pada umumnya. oleh karena ini, penulis tertarik untuk kembali mengenang jasa perjuangan seorang tokoh ulama Teungku Muhammad Daud Beureueh pada saat membela Republik Indonesia, mendirikan pesantren yang di kunjungi oleh santri-santri dari seluruh Aceh yang kemudian telah menjadi tokoh-tokoh agama di tempat masing-masing,

membentuk organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), membangun Aceh dan memperjuangkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh pada masa pasca kemerdekaan republik Indonesia, yang akhirnya melahirkan gerakan DI/TII di Aceh.

Oleh sebab itu, dalam tulisan ini penulis ingin mengungkapkan kembali sejarah kehidupan, perjuangan membela tanah air Indonesia, pemberlakuan syari'at Islam dan pemikiran-pemikiran Teungku Muhammad Daud Beureueh. Semoga dengan mengenang jasa perjuangan dan menganalisa pemikiran-pemikiran beliau, kita semakin benar menilai perjuangan beliau terhadap bumi Aceh, tidak meyalahkan tindakan beliau sebagai pemberontakan yang bertentangan dengan hukum-hukum Negara, bahkan mencela perjuangannya, sebagaimana yang lontarkan oleh sisi-sisa feodal yang menjadi lawannya atau orang-orang yang berada di bawah pengaruh mereka. Dengan demikian kita semakin mengakui akan keluhuran tujuan perjuangannya dalam menegakkan berdirinya Negara Republik Indonesia dan ajaran Islam di Tanah Rencong.

II. PEMBAHASAN

A. *Riwayat Hidup Teungku Daud Beureueh*

Teungku Muhammad Daud Beureueh lahir di Beureueh, Sigli tahun 1900. Ia adalah seorang ulama, pejuang kemerdekaan, dan terlibat dalam sejarah Kontroversial pemberontakan rakyat Aceh terhadap kepemimpinan Soekarno pada zaman Orde Lama. Nama kecilnya Muhammad Daud, Tambahan "Beureueh" di belakang namanya menunjukkan desa tempat kelahirannya, Beureueh, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Memang suatu kebiasaan pada sebagian orang di Aceh yang menaruhkan nama kampungnya kedalam namanya. Dan di depan namanya ditambahkan "Teungku", yang bagi masyarakat Aceh merupakan gelar khusus untuk Ulama.

Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak pernah masuk sekolah formal. tapi kendati pun begitu, dia tidak buta huruf latin. Dia bukan hanya keluaran pesantren, tetapi malah Teungku Muhammad Daud Beureueh mampu mendirikan pesantren. Yaitu pada tahun 1930 ia telah mendirikan Madrasah Sa'adah Abadiah di sigli, dan tersohor sampai seluruh Aceh. Teungku Daud Beureueh adalah ulama yang tahan uji, Teungku Daud Beureueh merupakan ulama yang tegas karena pendiriannya dalam agama Islam.

Beliau adalah tempaan pesantren sejati. Mula-mula beliau belajar di Pesantren Titeue, yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad hamid selama setengah tahun. Kemudian pindah ke Pesantren Iie Leumbeue, yang dipimpin oleh Tgk. Ahmad Harun yang terkenal dengan teungku di Tenoh Mirah. Setelah empat setengah tahun belajar disana beliau keluar sebagai

ulama tulen. Setelah itu beliau kawin dengan Tgk. Halimah di Kampung Usi Menasah Dayah. Pada tahun 1930 barulah beliau membentuk Jam'iah Diniyah dan sesudah itu mendirikan Madrasah Sa'adah Abadiyah di Blang Paseh, Sigli.

Sungguh suatu kebanggaan bagi kita generasi Aceh apabila banyak tokoh-tokoh Aceh seperti Teungku Daud Beureueh yang mempunyai arah ingin memajukan Aceh dengan membangun banyak madrasah demi kemajuan pendidikan Aceh. Betapa mulianya perjuangan beliau, dimana pada umur 31 tahun sudah mampu membangun dan membina sebuah madrasah yang menjadi kebanggaan rakyat Aceh saat itu.

Sebagai seorang polemik, orator yang jago pidato, ia juga dikenal sebagai Ulama berpendirian tegas sebagaimana watak orang Aceh. Daud Beureueh tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun. Ia sering berbeda pendapat dengan penguasa, terutama tentang masalah pemerintah dan agama yang tidak cocok dalam pandangannya. Ia juga sangat anti komunis yang dipandang sebagai musuh Islam. karena itu, umat Islam Aceh diperintahkannya supaya menjauhkan diri dari PKI ketika organisasi itu mulai berkembang di sana.³

Dengan semangat keberanian yang dimiliki Teungku Daud Beureueh itu, sehingga Teungku Daud Beureueh aktif bergabung dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga ia pernah menjadi pimpinan organisasi bahkan pernah memegang beberapa jabatan dalam pemerintah. Dan menjadi tokoh agama dalam menegakkan pemberlakuan hukum Islam di Tanah Air ini. Sehingga Teungku Muhammad Daud Beureueh digolongkan kedalam ulama kaum muda modernis yang besar pengaruhnya, baik dalam organisasi yang tumbuh-didirikan di dan oleh putra Aceh sendiri maupun organisasi cabang dari wilayah lain di tanah air.⁴

B. Perjuangan dan Politik Teungku Muhammad Daud Beureueh

Peran serta Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam dunia politik dan posisinya sebagai pejuang sudah dibuktikannya sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1939, di Aceh didirikan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Teungku Daud Beureueh terpilih sebagai ketua yang berturut-turut terpilih menjadi Ketua Islam sampai beberapa periode.⁵ Ini menjadi satu tanda bahwa Teungku Muhammad Daud seorang yang acceptable dan besar pengaruhnya di Tanah Rencong. Organisasi ini kemudian menggembelng rakyat Aceh untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. pada waktu Jepang berkuasa di Aceh, ia pernah ditahan karena dicurigai sebagai pimpinan dan Ulama pemberontak. Tetapi tidak lama kemudian ia dibebaskan kembali. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ia bersama pengikutnya berjuang dengan gigih untuk mempertahankan Republik Indonesia di

front Aceh. Atas jasanya ia diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai DPA RI di Aceh.

Pada waktu pembentukan TNI sebagai gabungan TRI dengan laskar-laskar rakyat, di Aceh masih terdapat pertentangan. di belakang Teungku Daud Beureueh masih banyak pengikut yang terdiri dari berbagai kelompok laskar perjuangan. akan tetapi, dengan menggunakan wibawanya, ia berhasil mempersatukan berbagai kelompok itu menjadi TNI demi persatuan bangsa. Atas jasanya itu, ia diangkat oleh wakil Presiden Mohamad Hatta menjadi Gubernur Militer untuk daerah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dengan pangkat Jenderal Mayor Tituler. Pada waktu terjadi Agresi II (1948), Teungku Daud Beureueh mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Demikian juga ketika Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di pedalaman Sumatera di bawah pimpinan Syarifuddin Prawiranegara, ia ikut aktif mengerakkan pergerakan perlawanan rakyat Aceh.⁶

Sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 1949 itu merupakan tahun genting dalam perjuangan kemerdekaan RI. Daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia kembali diduduki oleh Belanda kecuali Aceh, yang masih survive. Teungku Muhammad Daud Beureueh pada waktu itu merupakan Gubernur Militer Aceh yang banyak memberikan tempat yang lawak kepada pejabat-pejabat pemerintah Pusat yang terpaksa berhijrah ke Aceh, karena Presiden RI. Dan beberapa menteri telah ditawan oleh Belanda. Kutaraja pada waktu itu merupakan pusat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Aceh merupakan modal bagi L.N Palar, Duta Besar RI di PBB, dalam memperjuangkan menegakkan kembali Republik Indonesia yang sudah tersungkur. Dengan bermodalkan Aceh, Palar mendapat kemenangan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, Belanda menyerahkan kembali kedaulatan Kepada Republik Indonesia.⁷

Tetapi ketika pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia di umumkan, pada tahun 1950 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 5 Tahun 1950, Aceh dinyatakan menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Utara dengan Medan sebagai ibu kotanya. Kebijakan pemerintah pusat ini mendapat tantangan dari rakyat Aceh yang merasa haknya dikurangi, dan merasa tidak ada penghargaan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada pemerintah pusat. bahkan pada tahun 1948, Presiden Soekarno mengunjungi Aceh untuk mengumpulkan para tokoh dan pedagang Aceh untuk membantu perjuangan. pada waktu itu semua anggota masyarakat terutama pedagang mengumpulkan dana dan emas untuk membeli sebuah kapal terbang.⁸ Bahkan peristiwa yang menjadi problema nasional tersebut terjadi erat kaitannya dengan dan karena kecenderungan Jakarta yang munafik, dan Para petinggi republik telah mengecewakan tokoh ulama di Aceh.⁹

Dilihat dari jasa-jasanya yang begitu besar yang disumbangkan Teungku Daud Beureueh bersama rakyat Aceh memperjuangkan Tanah Air Indonesia dan membantu mempertahankan dan menegakkan kembali kedaulatan Republik Indonesia, maka sepantasnya pemerintah memberikan keistimewaan untuk Aceh dan untuk Teungku Daud Beureueh yang telah menyelamatkan Republik Indonesia. Pemerintah Pusat tidak pantas melukai perasaan rakyat Aceh dengan menggabungkan Aceh menjadi Propinsi Sumatera Utara. Dan menurut penulis, perlawanan rakyat Aceh terhadap kebijakan Pemerintah Pusat itu sangat pantas agar terbentuknya propinsi Aceh sendiri.

Penulis menilai bahwa, setting Politik Indonesia sejak dulu dilakukan oleh penguasa. Masa demokrasi terpimpin menimbulkan banyak kekacauan dan ketegangan politik serta keruntuhan ekonomi, bagi umat Islam Aceh, merupakan masa-masa kekacauan dan frustrasi. Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno telah mengenyahkan kesempatan berkembangnya Islam politik. Kebijakan nasional Soekarno tidak sejalan dengan kepentingan rakyat Aceh bahkan cenderung melenyapkannya. Kenyataan ini menimbulkan kesadaran di kalangan intelektual Aceh dan politik muslim yang menganggap Indonesia di bawah Orde Lama telah terjebak dalam arus nasionalisme sempit yang cenderung berkiblat pada paham komunisme.

Dengan adanya tantangan itu, Perdana Menteri Mohammad Natsir datang ke Aceh dalam usaha mencari jalan keluarnya. Rakyat Aceh akhirnya bergabung dengan Propinsi Sumatera Utara (Januari 1951). Penyelesaian ini dapat di capai dengan suatu janji pemerintah pusat untuk tidak menolak tuntutan rakyat Aceh akan otonomi daerah.¹⁰

Kemungkinan besar depolitisasi Islam telah mengarahkan Teungku Daud Beureueh kepada bangunan pemikiran Islam politiknya. meskipun ia telah banyak berjasa pada pemerintah Indonesia, namun roh islamismenya yang tinggi telah membangunkan dirinya dari kealpaanya terhadap nasib bangsa. Berbekal latarbelakang pendidikan Islam dan pengaruh ideologi PUSA. Teungku Daud Beureueh bersama tokoh-tokoh PUSA lainnya sejak awal telah mencita-citakan suatu negara Islam di Indonesia. mengingat umat Islam Aceh yang sebagian besar kaum dhuafa dan mushtad'afien adalah umat yang tertidas secara ekonomi maupun politik oleh negara sehingga kedua kelompok ini perlu dibela.

Akhirnya keadaan tenang di Aceh tidak berlangsung lama, awal tahun 1953 ketegangan kembali memuncak dengan adanya isu tentang penangkapan-penangkapan, rapat-rapat rahasia dan hubungan Teungku Daud Beureueh dengan Kartosuwiryo, pemimpin pemberontak Darul Islam (1949-1962). Para anggota PUSA mengadakan kompanye pemilihan umum dengan isi pidato menekan perlunya otonomi daerah dan negara Islam. Bersama pemimpin

PUSA lainnya, Teungku Daud Beureueh membentuk Bekas Pejuang Aceh (BPA) untuk mendukung perjuangannya.¹¹

Penghapusan Propinsi Aceh dan kurangnya perhatian pemerintah dalam pembangunan di Aceh membuat para ulama yang bergabung dalam PUSA mempersiapkan diri untuk memisahkan diri dari RI. sebagai contoh, janji pemerintah untuk memberikan dana bagi rehabilitasi irigasi di Aceh pada tahun 1952 sebesar lima juta rupiah tidak pernah dipenuhi. termasuk juga janji pemerintah untuk membangun jalan raya di Aceh sebesar 15 Juta rupiah tidak pernah terpenuhi.¹²

Ketika tuntutan rakyat Aceh tetap menjadi propinsi Aceh dan tidak digabung dengan propinsi Sumatera Utara dianggap angin lalu oleh pemerintah pusat. Berbagai ancaman dari pejabat Pemerintah Aceh, terutama Teungku Daud Beureueh yang mengatakan lebih baik berhenti jadi pejabat pemerintah jika tuntutan rakyat Aceh tidak dipenuhi. Sehingga Menteri Dalam Negeri, Mr. Assaat secara khusus menemui Teungku Daud Beureueh untuk dapat menerima keputusan pemerintah, dengan menawarkan kepada mantan Gubernur Militer itu untuk menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) atau menjadi Gubernur yang diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri. Semuanya ditolak Teungku Daud Beureueh karena ia setia kepada tuntutan rakyat Aceh. Ia mempertahankan Propinsi Aceh bukan karena ia Gubernur Militernya, tetapi demi kepentingan Aceh dan rakyatnya.¹³

Kurangnya perhatian pemerintah dalam pembangunan dan pembubaran Propinsi Aceh yang dibentuk pada tahun 1949 yang jabatan gubernur hingga kepala desa banyak didominasi oleh orang-orang PUSA.¹⁴ Kemudian diikuti dengan mutasi terhadap sejumlah pejabatnya yang kebanyakan adalah anggota PUSA, menimbulkan rasa sakit hati para ulama yang bergabung dalam PUSA yang dipimpin oleh Teungku Daud Beureueh. Jabatan-jabatan tersebut sangat diperlukan PUSA untuk memperjuangkan tegaknya hukum Islam di Aceh. akhirnya membulatkan tekad para ulama PUSA untuk bergabung dengan DI/TII pada tanggal 21 September 1953.¹⁵

Teungku Daud Beureueh dalam DI/TII pernah bergabung dalam menyatukan kekuatan dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang merupakan pemerintah tandingan yang ada di Sumatera untuk melawan rezim Soekarno. Tokoh RPI yaitu Hasan Tiro dari DI/TII pernah dikirim sebagai utusan RPI di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁶ Teungku Daud Beureueh mengusulkan kepada tokoh PRRI agar kelak di seluruh Republik Persatuan Indonesia (RPI) diberlakukan hukum Islam dan status NBA (Negara Bagian Aceh) diubah menjadi salah satu negara bagian dalam RPI yang diberi nama Republik Islam Aceh (RIA).¹⁷

Pada 21 September 1953, pemberontakan rakyat Aceh meletus, dan Teungku Daud Beureueh memproklamasikan Aceh dan daerah-daerah

sekitarnya menjadi Negara Islam Indonesia/Darul Islam, karena dalam pandangannya para pemimpin Orde Lama telah menyimpang dari jalan yang benar dan Republik Indonesia dinilai tidak berkembang mejadi suatu negara yang berdasarkan Islam.¹⁸ Teungku Muhammad Daud Beureueh berpendirian bahwa, jika pidana Tuhan tidak berlaku, berarti menyimpang dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Dan Teungku Daud Beureueh berpendapat bahwa pelaksanaan Syari'at Islam terhadap umat Islam adalah wajib hukumnya dan tidak bisa ditawar serta tidak bisa dikaitkan dengan undang-undang buatan manusia.²⁰ Sebagaimana firman Allah Surat Al-Maidah ayat 44-49.²¹

Dilihat dari pemikiran Teungku Muhammad Daud Beureueh di atas, maka menurut penulis, tidaklah salah Teungku Muhammad Daud Beureueh dan pengikut-pengikut setianya mempertahankan kebenaran pemahamannya dan memberontak kepada Pemerintah Pusat yang dianggapnya dhalim terhadap agama Islam.

Berdirinya DI/TII di Aceh ini mendapat tantangan dari kaum Uleebalang (bangsawan), persaingan untuk menjadi penguasa Aceh antara kelompok Uleebalang dengan kelompok PUSA sebenarnya telah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda dan meningkat pada saat Jepang menyerah (1945). Bahkan pada tahun 1946 sempat terjadi perang saudara di Aceh antara dua kelompok tersebut, yang berakhir dengan kemenangan kelompok PUSA. Perang saudara ini dikenal dengan nama *Peristiwa Cumbok*.²²

Ulama-ulama yang bergabung dalam PUSA sebagai arsitek utama pemberontakan DI/TII mempunyai dukungan yang kuat di sekitar daerah Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tengah. Pengaruh mereka yang kuat di daerah tersebut dikarenakan mereka memang memiliki banyak pesantren di sana.²³

Bahkan saat keberhasilan PUSA dalam mendominasi jabatan-jabatan pegawai negeri di Aceh rupanya menimbulkan ketidaksenangan di kalangan kelompok ulama lainnya. kelompok ulama tersebut adalah kelompok ulama yang bergabung dalam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Perti banyak mempunyai pesantren di daerah Aceh Barat dan Aceh Selatan yang kemudian menjadi daerah yang anti DI/TII.²⁴

Para ulama Perti melalui tokohnya seperti Teungku H. Hasan Krueng Kale, Teungku H. Makam Kampung Blang, Teungku Abdussalam Meuraxa, Teungku Sjah Mohd, Saied Sigli, dan Teungku H. Muda Wali Labuhan Haji, mengeluarkan fatwa mengutuk DI/TII. selanjutnya mereka minta pemerintah RI agar mempersenjatai mereka guna membantu TNI dalam tugasnya menumpas DI/TII Aceh.²⁵

Persaingan Ulama PUSA dan Perti memang sudah terjadi jauh sebelum Teungku Daud Beureueh memproklamasikan DI/TII Aceh.

penyebab utamanya adalah masalah jabatan-jabatan penting di Aceh. Keduanya sama-sama menginginkannya, namun ternyata PUSA lebih berhasil mendominasinya dan mendapat dukungan rakyat Aceh, bahkan ketika memberontak pun dukungan rakyat Aceh tetap mengalir kepada PUSA.

Tindakan para tokoh Perti di Aceh ternyata mendapat dukungan sepenuhnya dari para Pengurus Pusat Perti di Sumatera Barat. Selanjutnya untuk lebih memantapkan upaya menghancurkan DI/TII maka Perti dan Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Konferensi Ulama di Cipanas (Jawa Barat) tahun 1954. Hasil Konferensi tersebut memutuskan:

1. Bahwa RI adalah *Darul Islam*, dalam artian bukan sebagai negara yang memberlakukan hukum pidana Islam tetapi sebagai negara tempat tinggal umat Islam. Bukti bahwa RI adalah *Darul Islam* ialah bahwa pada zaman dahulu di wilayah RI pernah ada kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan lain-lain. Bahkan sampai kini pun mayoritas penduduk RI beragama Islam.
2. Soekarno (selaku Presiden RI), karena tidak menerapkan hukum pidana Islam, maka baginya tidak dapat disebut *Imam I'A'zam*, kepadanya hanya dapat diberi gelar *Wali Al-Amri Dharuri bi Al-Syaukah* (wali nikah bagi perempuan yang tidak ad walinya).

Kalau kita melihat konsep "Al-Islamu Kaljasadil Wahid", semangat persatuan merupakan hal sangat urgen yang perlu dipertahankan, namun dalam hal ini, ulama-ulama Aceh tidak mempersatukan tujuan perjuangannya sehingga harus saling menentang. Menurut penulis, persaingan itu akan banyak merugikan satu sama lain, bahkan rakyat Aceh pada umumnya yang akan menanggung semua penderitaannya. Seperti terjadinya peristiwa pembantaian penduduk desa Cot Jeumpa dan Pulot oleh TNI dari Batalion 142 tahun 1955.

Berlainan konsep PUSA dengan partai lainnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, karena Partai Islam punya kecenderungan menjadi moderat ketika berkuasa (berkualisi) dan menjadi radikal ketika beroposisi.²⁶ Berbebeda halnya dengan konsep PUSA yang sangat fundamentalis.

C. Masa Akhir Perjuangan Teungku Daud Beureueh

Pada tahun 1956 Propinsi Aceh kembali pulih dengan terpilihnya Ali Hasjmi (tokoh PSII) menjadi Gubernur pertama Aceh. pemulihan kembali propinsi Aceh membuat DI/TII Aceh terpecah. Kelompok Teungku Daud Beureueh tetap menghendaki negara Islam berdiri di Indonesia, sedangkan kelompok Hasan Saleh (Menteri Urusan Perang DI/TII Aceh) dan Ayah Gani menganggap pemberontakan harus diakhiri karena hak otonomi bagi Aceh telah dipulihkan kembali, akhirnya pada

tahun 1959 mereka menyerah setelah menerima amnesti dari pemerintah. Dan Aceh mendapat status Daerah Istimewa kepada Propinsi Aceh tahun 1959 sebagai imbalan kepada sebagian tokoh DI/TII Aceh yang bersedia meletakkan senjata. Sedangkan Teungku Daud Beureueh menerima tawaran amnesti dari pemerintah RI pada tahun 1962 setelah merasa kekuatannya semakin lemah.²⁷

Kembalinya Teungku Daud Beureueh diawali dengan perundingan Teungku Daud Beureueh dengan Nur El-Ibrahimi (utusan Kodam I Iskandar Muda) yang sepakat untuk menghentikan perang. Teungku Daud Beureueh bersedia turun dari puncak bukit *mardhatillahnya* jika kepada Aceh diberikan peluang untuk melaksanakan unsur-unsur Syari'at Islam kepada seluruh jajaran masyarakatnya. Itulah tuntutan, aspirasi dan obsesinya. ia tidak menuntut jabatannya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo karena itu bukan tujuan hidupnya. Ia pun tidak menuntut rumah gedung serba mewah atau konsesi perkebunan dimana ia menjadi Direktur Utamanya. Sesungguhnya tuntutan Teungku Daud Beureueh dan pengikutnya itu amat sederhana. Tuntutan itu pernah ditulis dengan tinta emas dalam Piagam Jakarta, sehari sebelum Proklamasi, yang dalam konsideran Dekrit Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa "*Piagam Jakarta tertanggal 22 Juli 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.*" Tetapi kaum nasionalis-sekuler dengan segala argumentasi menolak dicantumkan anak kalimat: "*.... dengan kewajiban melaksanakan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" pada pembukaan UUD 1945.²⁸

Pada tanggal 9 Mei 1962 Letnan Kolonel Nyak Adam Kamil (Kepala Staf Kodam I) menjemput Teungku Daud Beureueh. Tanggal 13 Mei 1962, bertepatan dengan hari jum'at bulan Suci Ramadhan Teungku Daud Beureueh tiba di Banda Aceh dan pada keesokan harinya beliau shalat Idul Adha di sana. Kembalinya Teungku Daud Beureueh telah mengakhiri perang saudara di Aceh yang telah berlangsung selama hampir sembilan tahun.²⁹ Berbeda dengan penjelasan Kaoy Syah dan Lukman Hakiem dalam bukunya *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, mereka menyebutkan bahwa, peperangan itu berlangsung selama tujuh tahun (1953-1960).³⁰ Dengan kembali kepangkuan Republik dan tahun berikutnya keamanan pulih kembali di Aceh.

Sejak beliau turun kembali ke Republik Indonesia beliau hidup sebagai warga Negara biasa. Dan Teungku Muhammad Daud Beureueh masih berusaha membangun Aceh, seperti membangun mesjid jamik Baitul A'la lil Mujahidin di Beureunun, membuat jalan-jalan dan jembatan-jembatan, menggali saluran-saluran irigasi yang baru dan memperbaiki saluran-saluran irigasi yang lama. Usaha ini merupakan gambaran dari perbaikan (reform) buat ulama dan buat rakyat. Pembuatan irigasi yang

baru seperti di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie berlangsung dalam tahun 1963 yang panjangnya tujuh belas kilometer, luasnya dua setengah meter dan dalamnya satu setengah meter dapat ditangani oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan kerja bakti bersama masyarakat, tidak dibiayai dengan anggaran dari pemerintah.³¹

Di hari tuanya, beliau masih giat melakukan dakwah di seluruh Aceh untuk meninggikan kalimah Allah dan memperjuangkan "Baladatul thayyibatun wa rabbun ghafur" seperti halnya sebelum naik ke bukit Mardhatillah. Meskipun ia usianya telah tua, beliau masih sanggup berpidato berjam-jam lamanya. Namun sangat disayangkan, pada tanggal 1 Mei 1978 Teungku Muhammad Daud Beureueh di luar kehendaknya sendiri dihijrahkan secara paksa oleh Pemerintah Republik Indonesia ke Jakarta. Tindakan yang tidak manusiawi (*inhuman treatment*) dan tidak bermoral (*immoral treatment*) dilakukan dengan alasan untuk memelihara keamanan yang telah stabil, berhubung di Aceh pada waktu itu timbul "Gerakan Aceh Merdeka" yang dipimpin oleh Hasan Tiro yang merupakan bekas anak didiknya dan sekaligus teman-teman seperjuangannya dalam gerakan DI/TII dahulu.

Selama 4 tahun, 5 bulan dan 4 hari berada di Jakarta di dalam pengawasan pemerintah, dengan restu Presiden Soeharto atas permohonannya yang disampaikan kepada beliau, dengan alasan keadaan badan yang sudah uzur, sehingga hanya jika dipapah baru dapat berjalan, dan mata yang hampir tidak dapat melihat, Teungku Daud Beureueh diizinkan pulang ke Aceh sekitar tahun 1982. Setelah kembalinya ke Aceh, beliau berada di bawah pengawasan Laksusda Aceh. Jadi tidak sembarang orang dapat mengunjunginya dengan leluasa. Beliau pun tidak sekehendak hatinya pergi ke tempat-tempat yang diinginkannya, kecuali seizing/setahu petugas Laksusda.³²

Usaha pemindahan dan pengawalan terhadap Teungku Daud Beureueh itu merupakan usaha pemerintah untuk menghindar adanya orang atau kelompok yang hendak memanfaatkan beliau, karena beliau merupakan tokoh yang sangat berpengaruh bagi rakyat Aceh serta sangat diperhitungkan dalam pembinaan sosial/politik di daerah Aceh. Ia menetap di daerah kelahirannya, Kampung Beureueh, Beureunuen (Kecamatan Mutiara), Kabupaten Pidie hingga tahun 1987. dan wafat di Banda Aceh pada tanggal 10 Juni 1987 dalam usia 88 tahun.³³ Beliau dimakamkan secara sederhana di halaman sebelah barat Masjid Baitul A'la lil Mujahidin yang didirikannya sendiri dan dikelola oleh Yayasan Baitul A'la yang juga didirikan oleh beliau.

III. PENUTUP

Teungku Muhammad Daud Beureueh yang lahir di Beureueh, Sigli tahun 1900 M merupakan seorang ulama, pejuang kemerdekaan, dan Tokoh

yang memproklamkan Aceh sebagai Negara Islam yang menjadi kontroversial terhadap kepemimpinan Soekarno pada zaman Orde Lama. Beliau tidak pernah masuk sekolah formal, namun dia tidak buta huruf latin. Bahkan pada tahun 1930 mampu mendirikan Madrasah Sa'adah Abadiyah di sigli.

Teungku Daud Beureueh merupakan ulama yang tegas pendiriannya dalam agama Islam, tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun walaupun dengan penguasa. Beliau tergolong kedalam ulama kaum muda modernis yang sangat anti komunis, ia pernah menjadi pimpinan organisasi dan beberapa jabatan dalam pemerintah. Peran serta Teungku Daud Beureueh dalam dunia politik dan posisinya sebagai pejuang dapat dibuktikannya sebelum kemerdekaan. Dan pada tahun 1939 Teungku Daud Beureueh memimpin PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Bersama pengikutnya berjuang dengan gigih untuk mempertahankan Republik Indonesia di front Aceh. Atas jasanya ia diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai DPA RI di Aceh.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ia bersama pengikutnya berjuang dengan gigih untuk mempertahankan Republik Indonesia di front Aceh. Atas jasanya ia diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai DPA RI di Aceh. Ia berhasil mempersatukan lascar-laskar rakyat menjadi TNI. Atas jasanya itu, ia diangkat oleh wakil Presiden Mohamad Hatta menjadi Gubernur Militer untuk daerah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Pada waktu terjadi Agresi II (1948), ia mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Belanda, juga ketika Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ketika menjabat Gubernur Militer Aceh tahun 1949, ia banyak memberikan tempat yang lawak kepada pejabat-pejabat pemerintah Pusat yang terpaksa berhijrah ke Aceh karena Negara yang sudah tersungkur. Dengan bermodalkan Aceh yang belum diduduki oleh Belanda, akhirnya mendapat kemenangan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Belanda menyerahkan kembali kedaulatan Kepada Republik Indonesia.

Namun ketika pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia di umumkan, pada tahun 1950 Aceh dinyatakan menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Utara. Kemudian adanya mutasi terhadap sejumlah pejabat yang kebanyakan adalah anggota PUSA yang memerlukan jabatan tersebut untuk memperjuangkan tegaknya hukum Islam di Aceh. Para petinggi republik telah mengecewakan tokoh ulama di Aceh, kecenderungan Jakarta yang munafik, akhirnya Pemerintah Pusat ini mendapat tantangan dari rakyat Aceh. Para ulama yang bergabung dalam PUSA mempersiapkan diri untuk memisahkan diri dari RI. Akhirnya para ulama PUSA bergabung dengan DI/TII. Pada 21 September 1953, pemberontakan rakyat Aceh meletus, dan Teungku Daud Beureueh memproklamasikan Aceh dan daerah-daerah sekitarnya menjadi Negara

Islam Indonesia/Darul Islam, karena dalam pandangannya, pelaksanaan Syari'at Islam terhadap umat Islam adalah wajib hukumnya.

Berdirinya DI/TII Aceh ini ditentang oleh kaum Uleebalang (bangsawan) dan kelompok ulama yang bergabung dalam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Para ulama Perti mengeluarkan fatwa mengutuk DI/TII. Pada tahun 1956 Propinsi Aceh kembali pulih dengan terpilihnya Ali Hasjmi (tokoh PSII) menjadi Gubernur Aceh yang pertama. Kelompok Hasan Saleh (Menteri Urusan Perang DI/TII Aceh) dan Ayah Gani menganggap pemberontakan harus diakhiri karena telah diberikan hak otonomi bagi Aceh. Sedangkan kelompok Teungku Daud Beureueh tetap menghendaki negara Islam berdiri di Indonesia. akhirnya Teungku Daud Beureueh menerima juga tawaran amnesti dari pemerintah RI pada tahun 1962 dan turun dari bukit *mardhatillahnya* dengan syarat kepada Aceh diberikan peluang untuk melaksanakan unsur-unsur Syari'at Islam kepada seluruh jajaran masyarakatnya.

Sejak kembali ke pangkuan Republik Indonesia Teungku Muhammad Daud Beureueh hidup sebagai warga Negara biasa masih mau berusaha membangun Aceh, dan di hari tuanya, beliau masih giat melakukan dakwah di seluruh Aceh. Namun pada tanggal 1 Mei 1978 Teungku Muhammad Daud Beureueh dihijrahkan secara paksa oleh Pemerintah Republik Indonesia. Akhirnya wafat di Banda Aceh pada tanggal 10 Juni 1987 dalam usia 88 tahun di Banda Aceh.

Endnotes

¹ H.M. Kaoy Syah, Lukman Hakiem, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2000), hal. 11.

² H.M. Kaoy Syah, Lukman Hakiem, *Keistimewaan Aceh Dalam*, hal. 8.

³ Shalahuddin Hamid, Iskandar Ahza, *Seratus Tokoh Islam Yang Paling Berpengaruh di Indonesia*, (Jakarta: Intimedia Ciptanusantara, 2003), hal. 266-267.

⁴ Misri A. Muchsin, *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2007), hal. 86.

⁵ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh Dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Da'wah, 2001), hal. 6.

⁶ Shalahuddin Hamid, Iskandar Ahza, *Seratus Tokoh Islam*, hal. 267.

⁷ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh*, hal. 6.

⁸ H.M. Kaoy Syah, Lukman Hakiem, *Keistimewaan Aceh Dalam*, hal. 3.

⁹ Misri A. Muchsin, *Potret Aceh Dalam*, hal. 86.

¹⁰ Shalahuddin Hamid, Iskandar Ahza, *Seratus Tokoh Islam*, hal. 267.

¹¹ Shalahuddin Hamid, Iskandar Ahza, *Seratus Tokoh Islam*, hal. 267.

¹² Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hal. 75.

- ¹³ H.M. Kaoy Syah, Lukman Hakiem, *Keistimewaan Aceh Dalam*, hal. 16.
- ¹⁴ Hendra Gunawan, *M. Natsir dan Darul Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 2000), hal. 18.
- ¹⁵ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh*, hal. 6.
- ¹⁶ Hendra Gunawan, *M. Natsir dan*, hal. 60.
- ¹⁷ Hendra Gunawan, *M. Natsir dan*, hal. 58.
- ¹⁸ Shalahuddin Hamid, Iskandar Ahza, *Seratus Tokoh Islam*, hal. 267.
- ¹⁹ Misri A. Muchsin, *Potret Aceh Dalam*, hal. 86.
- ²⁰ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh*, hal. 253.
- ²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal. 167-168.
- ²² Hendra Gunawan, *M. Natsir dan*, hal. 13.
- ²³ Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum*, hal. 75.
- ²⁴ Hendra Gunawan, *M. Natsir dan*, hal. 1.
- ²⁵ Hendra Gunawan, *M. Natsir dan*, hal. 18.
- ²⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hal. 100.
- ²⁷ Hendra Gunawan, *M. Natsir dan*, hal. 36-45.
- ²⁸ H.M. Kaoy Syah, Lukman Hakiem, *Keistimewaan Aceh Dalam*, hal. 27.
- ²⁹ Hendra Gunawan, *M. Natsir dan*, hal. 56.
- ³⁰ H.M. Kaoy Syah, Lukman Hakiem, *Keistimewaan Aceh Dalam*, hal. 28.
- ³¹ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh*, hal. 270-274.
- ³² M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh*, hal. 275-280.
- ³³ Shalahuddin Hamid, Iskandar Ahza, *Seratus Tokoh Islam*, hal. 267.